



(RENJA - PD)

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BAPPENDA TAHUN 2023



Pemerintah Daerah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah
Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon : (022) 6652559 Fax : (022) 6652559 Website : cimahikota.go.id
E-mail : bappenda@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 050/397/Bappenda

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) menjadi pedoman unit kerja perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

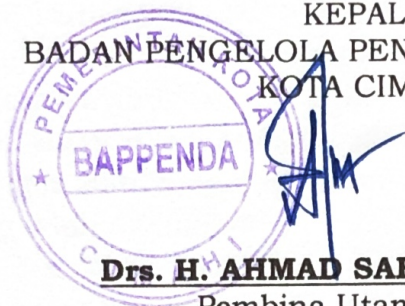
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 sebagai pedoman unit kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2023;
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disingkat RENJA PD, merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2023;
- KETIGA : Isi dan uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal, 14 Juli 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi serta merupakan turunan dari Rencana Strategis transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018-2021.

Pada Tahun 2023 Bappenda Kota Cimahi merencanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.476.240.906,- (*dua belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam rupiah*), untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

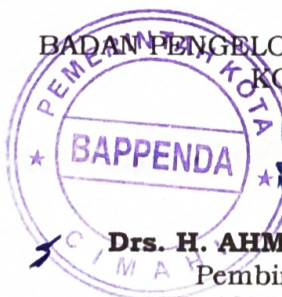
Mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappenda Kota Cimahi membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Cimahi, Juli 2022

KEPALA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappenda Kota Cimahi	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	55
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	55
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI	56
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI	70
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022 KOTA CIMAHI	8
Tabel 2.2.	KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL	29
Tabel 2.3.	ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA CIMAHI TAHUN 2018-2021	30
Tabel 2.4.	KOMPOSISI PAD KOTA CIMAHI TAHUN 2021	30
Tabel 2.5.	RATA-RATA CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI	32
Tabel 2.6.	TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2021	33
Tabel 2.7.	TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018-2021	33
Tabel 2.8.	TARGET DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN 2018-2021	34
Tabel 2.9.	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023	39
Tabel 2.10.	TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN 2018-2021	35
Tabel 2.11.	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KOTA CIMAHI	49
Tabel 3.1.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH YANG MENGACU PADA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023	58
Tabel 3.2.	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KOTA CIMAHI	63
Tabel 4.1.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN 2023	71
Tabel 4.2.	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2023 merupakan rencana tahunan kesatu dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang memuat rencana capaian indikator-indikator sebagai ukuran keberhasilan. Pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya. Berkaitan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal agar tidak selalu ketergantungan kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat sangat strategisnya posisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam dinamika pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, maka Rencana Kerja (RENJA)

Bappenda Kota Cimahi lebih ditekankan kepada peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Cimahi, karena untuk mewujudkan Visi Kinerja Pembangunan Kota Cimahi tentunya harus bergantung pada realisasi pendapatan daerah yang besar.

Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 adalah manifestasi dari dokumen RPD yang termuat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023 dengan Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Cimahi terkait optimalisasi potensi pendapatan daerah dan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik, yang dituangkan ke dalam Renstra Transisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Renja yang disusun ini perlu disinkronisasi juga, dengan acuan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660. Tambahan Berita Daerah Nomor 140).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 disusun untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lingkup perangkat daerah maupun tingkat Kota Cimahi dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.3.1. Maksud

- a. Menjadi Pedoman bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi didalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- c. Menjadi bahan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam menyusun Anggaran Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;

- b. Melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif.
- c. Melakukan pengukuran, evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun ke tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPPEND ATAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Bappenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja bappenda, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama setahun.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi yang akan dicapainya pada Tahun Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPENDA KOTA CIMAHI

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu rancangan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun sebelumnya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi tahun sebelumnya ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020, dan 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021, dan realisasi renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda dan realisasi APBD.

berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2022, sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022
KOTA CIMAHI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02. 01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas PD	BB Predikat	0,00 Predikat	BB Predikat	BB Predikat	100	BB Predikat	BB Predikat	100
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	58,97 %	0,00 %	53,85 %	53,85 %	100	94,59 %	53,85 %	91,32
5.02. 01.2. 01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33 dok	0 dok	17 dok	17 dok	100	17 dok	34 dok	103,03

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.01.01	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	8 dok	0 dok	4 dok	4 dok	100	4 dok	8 dok	100
		Jumlah dokumen renja	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen renstra	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen renja perubahan	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	200
		Jumlah forum perangkat daerah	2 keg	0 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	2 keg	100
5.02.01.2.01.07	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
		Jumlah dokumen SAKIP	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen SKM	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	8 dok	0 dok	4 dok	4 dok	100	4 dok	8 dok	100
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	24 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.02.01	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	28 kali	0 kali	14 kali	14 kali	100	14 kali	28 kali	100
		Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	24 kali	0 kali	13 kali	13 kali	100	12 kali	25 kali	104
5.02.01.2.02.07	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	4 keg	0 keg	2 keg	1 keg	50	2 keg	3 keg	75
5.02.01.2.05.07	SubKeg pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6 stel	0 dok	0 stel	0 stel	-	0 stel	0 stel	-
5.02.01.2.	SubKeg Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang difasilitasi	7 peg	0 peg	5 peg	0 peg	-	23 peg	23 peg	328,57

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05.11	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bimtek								
		Jumlah pegawai yang dibina	70 peg	0 peg	70 peg	70 peg	100	70 peg	70 peg	100
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.06.01	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.06.02	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	0 unit	11 unit	11 unit	100	10 unit	21 unit	190,91
		Jumlah bulan penyediaan ATK	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.06.03	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	35 jenis/ set	0 jenis/ set	18 jenis/ set	18 jenis/ set	100	17 jenis/ set	35 jenis/ set	100
5.02.01.2.06.0	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Kantor	kantor								
5.02.01.2.06.05	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	14 jenis	0 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	14 jenis	100
		Jumlah bulan penggandaan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.06.06	SubKeg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bln	0 bln	0 bln	0 bln	-	0 bln	0 bln	-
		Jumlah buku peraturan	2 buku	0 buku	0 buku	0 buku	-	0 buku	0 buku	-
5.02.01.2.06.08	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.06.09	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintah Daerah									
5.02.01.2.07.09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	100
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.08.01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.08.02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
		Jumlah bulan jasa listrik	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.02.01.2.09.02	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit	0 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit	0 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit	0 unit	10 unit	6 unit	60	5 unit	10 unit	100
5.02.01.2.09.10	SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	2,00 %	0,00 %	6,40 %	13,18 %	205,94	-9,45 %	-9,45 %	100
		% Realisasi Pajak Daerah	95 %	0 %	90 %	117,74 %	130,82	95 %	100,00 %	105
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.01	Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
5.02.04.2.01.02	Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	3 dok	5 dok	125
		Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
5.02.04.2.01.0	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak	14 keg	0 keg	7 keg	7 keg	100	7 keg	14 keg	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Kebijakan Pajak Daerah	daerah								
5.02.04.2.01.04	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	4 modul	0 modul	2 modul	2 modul	100	2 modul	4 modul	100
		Jumlah sistem yang dipelihara	3 sistem	0 sistem	3 sistem	3 sistem	100	3 sistem	3 sistem	100
		Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.04.2.01.05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.07	Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP	0 WP	129.608 WP	129.608 WP	100	129.608 WP	129.608 WP	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
5.02.04.2.01.08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.09	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100 %	0 %	0 %	0 %	-	0 %	0 %	-
5.02.04.2.01.10	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP	0 WP	129.608 WP	129.608 WP	100	129.608 WP	129.608 WP	100
5.02.04.2.01.11	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	12 kali	0 kali	12 kali	12 kali	100	0 kali	12 kali	-
		Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	2.972 WP	0 WP	1.356 WP	1.356 WP	100	1.616 WP	2.972 WP	100
5.02.04.2.01.1	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak	% Penyelesaian permohonan keberatan dan	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Daerah	pengurangan pajak daerah								
5.02.04.2.01.13	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	540 obj pjk	0 obj pjk	240 obj pjk	240 obj pjk	100	300 obj pjk	540 obj pjk	100
5.02.04.2.01.14	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	24 kali	0 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	24 kali	100

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dan capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2020, tidak dapat dituangkan ke dalam tabel sehubungan dengan adanya kebijakan pusat dalam penyusunan perencanaan, namun dapat dilihat sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 375.687.242.678,91 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 360.955.331.172,96, terrealisasi peningkatannya sebesar 4,08% dari target -8,07%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan **sangat baik**.
- Hasil pengukuran kinerja capaian kinerja program Bappenda Kota Cimahi terdiri dari :
 1. Program perencanaan, pengelolaan anggaran daerah, barang milik daerah, dan perbendaharaan daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya :
 - a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 158.937.237.899 sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 163.136.977.065, dengan terrealisasi peningkatannya sebesar -2,57% dari target -16,03%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka nilai kinerjanya dikatakan sangat baik.

b. Realisasi target pendapatan daerah

Hasil pengukuran kinerja realisasi target pendapatan daerah terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut bahwa realisasi pendapatan daerah tahun berjalan sebesar Rp. 1.457.996.459.899,91 sedangkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.462.841.536.679,92, dengan persentase capaian sebesar 99,67%, maka nilai kinerjanya dikatakan mempunyai makna baik.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor, mempunyai indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang dipelihara, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dilihat berdasarkan dari jumlah jenis sarana dan prasarana yang ada di setiap ruangan kerja yang tertuang dalam kartu inventaris ruangan (KIR), dari 23 ruangan ada sebanyak 217 jenis sarana prasarana yang terinventarisir dan sebanyak 217 jenis sarana dan prasarana dalam kondisi baik, ruangan-ruangan tersebut.
 3. Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, mempunyai indikator kinerja Persentase ASN yang dibina, dengan capaian kinerja 100%, dilihat dari jumlah ASN yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 71 pegawai.
 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama nilai LAKIP Bappenda Kota Cimahi, nilai yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 75,92, Sementara pada tahun 2019 perolehan nilai sebesar 77,06, adanya penurunan, namun masih dengan kategori BB dan interpretasi sangat baik, akuntabel. Berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Selain itu untuk indikator kedua persentase realisasi anggaran, dimana target kinerja yang ditetapkan 95,34% dengan realisasi kinerja 94,44% capaian kinerjanya 99,06%.
- Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020 terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), terkait persentase PAD dari tahun sebelumnya terhadap Rencana

Strategis (RENSTRA) dari target capaian kondisi akhir sebesar 1,95%, sedangkan untuk target capaian kinerja rencana strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 sebesar -8,07%, terrealisasi pada periode tahun ketiga sebesar 4,08% dengan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 250,56%, capaian tersebut dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik, akibat dari peristiwa Pandemi Covid-19. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan PAD.

- Realisasi anggaran belanja langsung sebagai pelaksanaan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan kinerja di capaian tahun 2020 yaitu, realisasi keuangan sebesar 94,44% bila dibandingkan dengan realisasi kinerja adalah lebih dari 100%, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan.
- Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.839.823.287,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.007.001.686,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,56%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah yang persentase efisiensinya mencapai 17,76%, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang persentase efisiensinya mencapai 20,13%, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang persentase efisiensinya mencapai 14,63%, selain itu pada kegiatan penataan arsip daerah yang persentase efisiensinya mencapai 10,27%.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja tujuan, sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	26,61%	26,65%	100,15 %	Sangat Baik

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Target kinerja 26,61% terrealisasi sebesar 26,65% dengan capaian kinerja 100,15% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 405.104.991.553 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.520.135.560.503, maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 26,65%. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya.

- Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu

meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-7,74%	7,83%	301,16%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Target kinerja yang telah ditetapkan -7,74% terrealisasi sebesar 7,83% dengan capaian kinerja 301,16% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 405.104.991.553 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 375.724.242.678.77, terrealisasi peningkatannya sebesar 7,83% dari target -7,74%, capaian tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

- Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Persentase realisasi pajak daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

- Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi
- Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum
- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-3.87%	13,18%	540,57%	Sangat Baik
	Persentase realisasi pajak daerah	90%	117,74%	130,82%	Sangat Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	BB	100%	Baik
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	Baik
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	53,85%	53,85%	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :.
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
Target kinerja -3,87% terrealisasi sebesar 13,18% dengan capaian kinerja 540,57% atau mempunyai makna

Sangat Baik, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 179.891.802.962,- sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 158.937.237.899,- dengan terrealisasi penurunannya sebesar 13,18% dari target -3,87%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

- Persentase Realisasi Pajak Daerah

Target kinerja 90% terrealisasi sebesar 117,74% dengan capaian kinerja 130,82% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPTHTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 117,74,% dari target 90%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 130,82%. dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
Hotel	219.703.500	283.417.966	129
Restoran	14.278.402.073	17.018.807.906	119,19
Hiburan	88.096.000	123.330.330	140
Reklame	1.748.195.268	2.326.007.100	133,05
Penerangan Jalan	34.709.763.147	37.701.852.705	108.62
Parkir	620.000.000	937.097.932	151,14
Air Tanah	6.360.000.000	8.237.134.116	129,51
BPHTB	42.262.327.061	55.960.840.082	132,41
PBB-P2	52.500.391.242	57.303.314.555	109,15
Jumlah	152.786.878.291	179.891.802.692	117,74

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Rata-rata persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar 128%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja BB sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 100% atau mendapatkan nilai 76,03% dengan kategori BB, sehingga mempunyai makna baik, bila membandingkan dengan nilai tahun lalu yaitu sebesar 75,92% terdapat kenaikan sebesar 0,11%, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi.

- Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum.

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukuran kinerja persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dilihat dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, jumlah unit kerja Bappenda Kota Cimahi sebanyak 10 unit terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Bidang Identifikasi Pendapatan, Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Program dan Keuangan, Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Subbid Perencanaan Pendapatan dan Sistem informasi Pajak Daerah, Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan, dan Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah.

- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

Target kinerja 53,85% terrealisasi sebesar 53,85% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 21 orang sedangkan jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi posisi bulan desember Tahun 2021 berjumlah sebanyak 39 orang dengan realisasi sebesar 53,85% dari target 53,85%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2021 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	135.100 WP	100%	Baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100%	Baik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Baik
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kegiatan sebesar 94%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Bappenda Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, sehingga Bappenda Kota Cimahi cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan yang dibuat oleh Bappenda Kota Cimahi.

2.2.1. Analisis Desentralisasi Fiskal

Menurut Bisma (2010 : 78) Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

TABEL 2.2
KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Rumusan rasio desentralisasi fiskal yaitu :

$$\text{ddf} \quad : \quad \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

TABEL 2.3
ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 – 2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Tingkat Kemandirian Daerah
2018	1,316,230,476,122.39	335,016,530,127,39	25.45%	Sedang
2019	1.433.371.386.973,96	360.955.331.172,96	25.18%	Sedang
2020	1.457.996.459.899,91	375.687.242.678,91	25.77%	Sedang
2021	1.520.135.560.503,11	405.104.991.553,11	26.65%	Sedang

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

Berdasarkan hasil analisis diatas maka secara umum indikator kinerja sasaran Bappenda Kota Cimahi dalam meningkatkan desentraliasasi fiskal di Kota Cimahi pada tahun 2018-2021 masih berada pada kategori posisi sedang.

TABEL 2.4
KOMPOSISI PAD KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI (Rp.)	% Terhadap PAD
1	Hasil Pajak Daerah	179.891.802.692,00	44,41
2	Hasil Retribusi Daerah	11.548.482.640,00	2,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	2,46
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	203.707.746.221,11	50,29
JUMLAH PAD		405.104.991.553,11	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar dari PAD berasal dari komponen Lain-lain PAD yang sah, yang didalamnya merupakan pendapatan dari BLUD, yaitu sebesar 50,29%, kemudian disusul oleh komponen pajak daerah sebesar 44,41%, retribusi daerah 2,85%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,46%.

2.2.2. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 - 2021

Capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi dari Tahun 2018 - 2021, setiap tahunnya melampaui dari target PAD yang telah di tetapkan, rata-rata persentase capaian sebesar 108,62%. Penyumbang PAD terbesar dilihat berdasarkan persentase rata-rata realisasi terhadap target dari setiap tahunnya berasal dari komponen pajak daerah sebesar 109,29%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 109,03%, kemudian retribusi daerah sebesar 101,58% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 101,03%.

Tabel penyajian rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2018 - 2021, sebagai berikut :

TABEL 2.5
RATA-RATA CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 - 2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	102	101	116	118	109
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	94	109	103	101	102
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	100	100	104	100	101
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	104	102	112	118	109
JUMLAH	326.842.694.184	354.211.073.635	331.843.741.664	346.622.143.134	335.016.530.127	360.955.331.173	375.687.242.679	405.104.991.553	103	102	113	117	109

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

2.2.3. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengalami pertumbuhan positif dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pajak daerah pada tahun 2018-2021 sebesar 109%, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 118% dari target sebesar Rp. 179.891.802.962,- dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.6
TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH
TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	102	101	116	118	109

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

2.2.4. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh perangkat daerah penghasil, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil retribusi daerah pada tahun 2018-2021 sebesar 102%, sedangkan capaian realisasi dari hasil retribusi daerah pada tahun 2021 sebesar 101% dari target sebesar Rp. 11.548.482.640,- hal tersebut merupakan pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.7
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	94	109	103	101	102

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

2.2.5. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu lembaga keuangan Bank oleh Bank Jabar, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2018-2021 sebesar 101 %, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar Rp. 9.956.960.000, pendapatan ini mempunyai pertumbuhan yang tetap dan masih dalam pertumbuhan positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.8
TARGET DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	100	100	104	100	101

Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 non Audit (diolah)

2.2.6. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Lain-lain PAD yang Sah

Hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi jasa usaha, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN pada FKTP, dan dana non kapitasi.

Rata-rata realisasi capaian dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018-2021 sebesar 109%, sedangkan capaian

realisasi pada tahun 2021 sebesar 118% dari target sebesar Rp. 203.707.746.221,- pendapatan tersebut adanya pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.9
TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	104	102	112	118	109

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021
(diolah – audit BPK)

2.2.7. Faktor Yang Mendorong Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui Pembayaran pajak daerah secara online yang mendorong kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, PT. Pos Indonesia dan e-commerce.
2. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan.
3. Pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
4. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan angka pengangguran oleh Pemerintah Kota Cimahi sehingga meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.
5. Kondisi makro ekonomi nasional yang kondusif.

2.2.8. Faktor Yang Menghambat Peningkatan Pajak Daerah.

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional profesional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru Sita dan lainnya.
2. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.
3. Luas wilayah yang relatif kecil (40 km²) dimana sepertiga wilayah adalah pusat pendidikan militer.
4. Masalah perizinan (Air tanah, reklame).
5. Data Base belum valid (PBB).
6. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
7. Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
8. Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif dan pengaruh negatif eksternal lainnya.

2.2.9. Potensi Baru

Strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pendekatan Teknis, yaitu :
 - a. Ekstensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan cara menggali/mencari potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.
 - b. Intensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi sumber PAD yang sudah ada.
2. Pendekatan Yuridis, yaitu meningkatkan PAD melalui pembuatan atau penyempurnaan regulasi.

GAMBAR 2.1 STRATEGI PENINGKATAN ASLI DAERAH (PAD)



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional professional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru sita dan lainnya.
2. Masalah perizinan (Air tanah, reklame).
3. Data Base belum valid (PBB).
4. Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Tidak adanya SDA potensial.
6. Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif.
7. Pertumbuhan ekonomi kota belum secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat.
8. Seiring berjalannya waktu maka potensi pajak meningkat namun belum dilakukan pembaharuan potensi pajak.

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan denganTupoksi.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi yang sinergis seoptimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
4. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
5. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

Berikut ini disajikan review Rencana Kerja Bappenda Kota Cimahi terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi :

TABEL 2.10
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA CIMAHI

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	3,00%	2.894.993. 282	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	3,00%	2.894.993. 282	
		% Realisasi Pajak Daerah	100,00 %				% Realisasi Pajak Daerah	100,00 %		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	113.348 WP	2.895.000. 000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	113.348 WP	2.895.000. 000	
<i>SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah</i>	<i>2 dok</i>	<i>59.999.814</i>	<i>SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah</i>	<i>2 dok</i>	<i>59.999.814</i>	
<i>SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah</i>	<i>1 dok</i>	<i>158.000.00 0</i>	<i>SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah</i>	<i>1 dok</i>	<i>158.000.00 0</i>	
<i>SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</i>	<i>7 lap</i>	<i>145.000.00 0</i>	<i>SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah</i>	<i>7 lap</i>	<i>145.000.00 0</i>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit	430.994.77 8	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit	430.994.77 8	
SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	2 lap	349.999.99 2	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	2 lap	349.999.99 2	
SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap	51.999.964	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap	51.999.964	
SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 objek pajak	95.999.678	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 objek pajak	95.999.678	
SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	113.348 dok	829.999.25 0	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	113.348 dok	829.999.25 0	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	117.241 dok	157.999.80 6	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	117.241 dok	157.999.80 6	
SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1400 dok	130.000.00 0	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1400 dok	130.000.00 0	
SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok	113.000.00 0	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok	113.000.00 0	
SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dok	242.000.00 0	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dok	242.000.00 0	
SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12 dok	70.000.000	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12 dok	70.000.000	
SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap	60.000.000	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap	60.000.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai	9.581.247. 624	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai	9.581.247. 624	
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57,50 Nilai			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57,50 Nilai		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai		
Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dok	124.163.1 28	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dok	124.163.1 28	
<i>SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>2 dok</i>	<i>55.466.864</i>	<i>SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>2 dok</i>	<i>55.466.864</i>	
<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD</i>	<i>1 dok</i>	<i>2.939.800</i>	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD</i>	<i>1 dok</i>	<i>2.939.800</i>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	1 dok	2.465.300	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	1 dok	2.465.300	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 dok	2.710.000	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 dok	2.710.000	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	1 dok	2.440.000	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	1 dok	2.440.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>4 lap</i>	<i>8.849.500</i>	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	<i>4 lap</i>	<i>8.849.500</i>	
<i>SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>5 lap</i>	<i>49.291.664</i>	<i>SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>5 lap</i>	<i>49.291.664</i>	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	8.523.381.576	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	8.523.381.576	
<i>SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>40 orang</i>	<i>8.477.604.712</i>	<i>SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>40 orang</i>	<i>8.477.604.712</i>	
<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	<i>1 lap</i>	<i>46.209.864</i>	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	<i>1 lap</i>	<i>46.209.864</i>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap	1.567.000	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap	1.567.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 keg	67.238.30 0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 keg	67.238.30 0	
SubKeg Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	70 orang	18.799.900	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	70 orang	18.799.900	
SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	8 orang	48.438.400	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	8 orang	48.438.400	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	348.401.028	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	348.401.028	
<i>SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>2.396.000</i>	<i>SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>2.396.000</i>	
<i>SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>77.011.364</i>	<i>SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>77.011.364</i>	
<i>SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>7.869.000</i>	<i>SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>7.869.000</i>	
<i>SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>82.256.864</i>	<i>SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>82.256.864</i>	
<i>SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>61.831.800</i>	<i>SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>61.831.800</i>	
<i>SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu</i>	<i>5 lap</i>	<i>3.500.000</i>	<i>SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu</i>	<i>5 lap</i>	<i>3.500.000</i>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
<i>SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>100 lap</i>	<i>113.536.000</i>	<i>SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>100 lap</i>	<i>113.536.000</i>	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitas gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	114.688.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitas gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	114.688.000	
<i>SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>4 unit</i>	<i>39.688.000</i>	<i>SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>4 unit</i>	<i>39.688.000</i>	
<i>SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>1 unit</i>	<i>75.000.000</i>	<i>SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>1 unit</i>	<i>75.000.000</i>	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	118.543.528	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	118.543.528	
<i>SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>4 lap</i>	<i>87.893.528</i>	<i>SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>	<i>4 lap</i>	<i>87.893.528</i>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
<i>SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>30.650.000</i>	<i>SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	<i>12 lap</i>	<i>30.650.000</i>	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	282.832.0 64	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	282.832.0 64	
<i>SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>	<i>10 kend</i>	<i>193.912.06 4</i>	<i>SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</i>	<i>10 kend</i>	<i>193.912.06 4</i>	
<i>SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	<i>30 alat</i>	<i>88.920.000</i>	<i>SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	<i>30 alat</i>	<i>88.920.000</i>	
				12.476.240. 906					12.476.240. 906	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan renja dilaksanakan kegiatan forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mempertajam indikator dan sinergitas program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Dari pelaksanaan forum perangkat daerah itu sendiri diperoleh masukan, yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- 1. Peningkatan teknologi informasi terbaru dengan pembangunan/ pengembangan IT sebagai sarana komunikasi, integrasi kesisteman, layanan dan informasi lebih cepat dan mudah, memudahkan akses informasi, serta kemudahan dalam pelayanan secara digital/ elektronifikasi dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan Penggalian potensi pendapatan daerah lainnya.

Berikut ini usulan program dan kegiatan Bappenda Kota Cimahi hasil pelaksanaan kegiatan dengan para pemangku kepentingan pada tahun 2023 yang dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

TABEL 2.11
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA CIMAHI

Nama Perangkat Daerah : Bappenda Kota Cimahi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	3,00%
			% Realisasi Pajak Daerah	100,00%
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	113.348 WP
1	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dok

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
2	SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	1 dok
3	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	7 lap
4	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit
5	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	2 lap
6	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap
7	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 objek pajak
8	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	113348 dok
9	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	117241 dok
10	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1400 dok
11	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok
12	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan	525 dok

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
	<i>Pengawasan Pajak Daerah</i>		<i>pengawasan pajak daerah</i>	
13	<i>SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah</i>	<i>12 dok</i>
14	<i>SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah</i>	<i>2 lap</i>
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB) Nilai
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57,50 Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai
II	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 dok
15	<i>SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>2 dok</i>
16	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD</i>	<i>1 dok</i>
17	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD</i>	<i>1 dok</i>
18	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD</i>	<i>1 dok</i>

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
19	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok
20	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 lap
21	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 lap
III	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
22	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang
23	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap
24	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 keg
25	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang
26	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	8 orang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
	<i>Perundang-Undangan</i>		<i>peraturan perundang-undangan</i>	
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
27	<i>SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</i>	<i>1 paket</i>
28	<i>SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	<i>1 paket</i>
29	<i>SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>
30	<i>SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>
31	<i>SubKeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>	<i>2 paket</i>
32	<i>SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu</i>	<i>5 lap</i>
33	<i>SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>100 lap</i>
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan
34	<i>SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>4 unit</i>
35	<i>SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</i>	<i>1 unit</i>
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
36	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 lap
37	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan
38	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 kend
39	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 alat

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

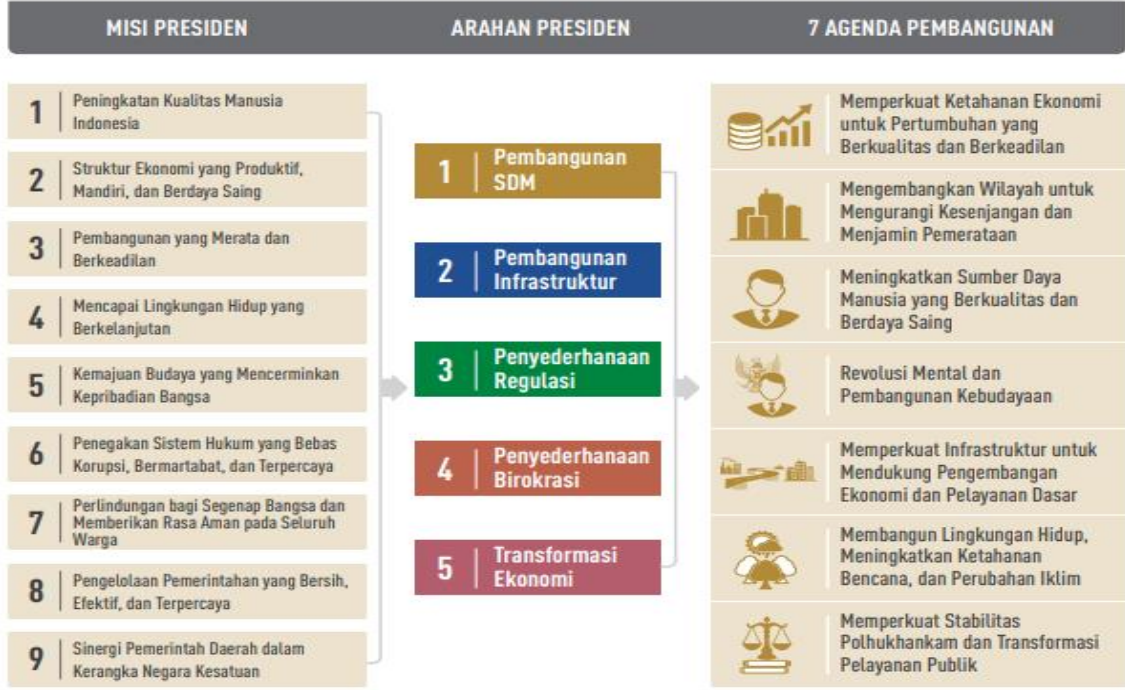
BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut :



Visi dan misi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dapat terwujud jika didukung pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik agar kemandirian dalam segi pembiayaan pembangunan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik akan mendukung dalam menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah, yang merupakan cikal bakal dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri.

Agenda pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan strategis Bappenda. Hal ini tercantum dalam Rancangan Renstra Transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat berkaitan dengan agenda ini.

Bappenda Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki peran yang strategis dalam pendanaan pembangunan di daerah Kota Cimahi. Kelancaran pembangunan Kota Cimahi akan sangat bergantung pada keberhasilan Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola pendapatan daerah.

Isu strategis Bappenda Kota Cimahi akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMN dan RPD, dimana isu strategis keterkaitan dengan Bappenda Kota Cimahi mengenai kualitas pembangunan ekonomi. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Cimahi Tahun 2023, adalah :

1. Kemiskinan
2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Kualitas pembangunan ekonomi
4. Tata kelola pemerintahan
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI

Keterkaitan dan terjalinnya sinergitas antara Pembangunan Pusat dan Daerah harus tercipta dengan baik, karena pada hakekatnya baik Pusat maupun Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat madani yang sejahtera serta mandiri.

Daerah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut tentunya memiliki visi dan misi pembangunan termasuk Kota Cimahi, dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023-2026, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kota serta target yang telah ditetapkan.

VISI : Cimahi Kota Cerdas

MISI : 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi. Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang berkeadilan
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Fungsi Bappenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah akan bergantung pada kinerja Bappenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dimana hal tersebut sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappenda Kota Cimahi maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Bappenda Kota Cimahi dalam penyelenggaraan sebagian urusan keuangan daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan urusan keuangan daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappenda Kota Cimahi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2023-2026, adalah :

1. Tujuan Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi
 - Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

2. Sasaran Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi
- Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah
 - Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, Indikator sasaran beserta target kinerja sasarnya. Rumusan tersebut disajikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan resiko maupun anomali yang mungkin saja terjadi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya, dalam tabel sebagaimana berikut ini :

TABEL 3.1

TUJUAN & SASARAN JANGKA MENENGAH YANG MENGACU PADA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan/ Sasaran Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,45%
	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	28,24%
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B) Indeks
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	30 Nilai

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Yang sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam hal ini yang dimaksud program kerja adalah susunan rencana kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan.

Rencana kerja Bappenda Kota Cimahi disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang tercantum dalam RPD dan Renstra. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang selaras dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah, Bappenda Kota Cimahi telah menyusun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- I. Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2. Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 4. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

5. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
11. Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
12. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
13. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
14. Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- II. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 15.Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 16.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 17.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 18.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 19.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- 20.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 21.Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- III. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 22.Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 23.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 24.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD
- IV. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 25.Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 26.Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- V. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 27.Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 28.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 29.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 30.Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 31.Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 32.Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 33.Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- VI. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 34.Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
- 35.Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- VII. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- 36.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 37.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- VIII. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 38.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 39.Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA CIMAHI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah		3,00%	2.894.993.282		3,00%	4.021.747.000
					% Realisasi Pajak Daerah		100,00%			100,00%	
	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD		113.348 WP	2.894.993.282		115.615 WP	4.021.747.000
			01	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	2 dok	59.999.814	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 dok	73.000.000
			02	SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Kota Cimahi	1 dok	158.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 dok	245.600.000
			03	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kota Cimahi	7 lap	145.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	8 lap	170.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	04	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	2 unit	430.994.778	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 unit	680.747.000
	05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	2 lap	349.999.992	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 lap	350.000.000
	06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	3 lap	51.999.964	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 lap	57.500.000
	07	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	145 objek pajak	95.999.678	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		155 objek pajak	101.000.000
	08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	113.348 dok	829.999.250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		115615 dok	833.000.000
	09	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Cimahi	0	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		575 layanan	-
	10	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	117.241 dok	157.999.806	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		120758 dok	174.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			11	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kota Cimahi	1400 dok	130.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1425 dok	225.000.000
			12	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Kota Cimahi	419 dok	113.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		413 dok	167.800.000
			13	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kota Cimahi	525 dok	242.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		575 dok	275.000.000
			14	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kota Cimahi	12 dok	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 dok	122.000.000
			15	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Kota Cimahi	2 lap	60.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 lap	547.000.000
01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		71 (BB) Nilai	9.581.247.624			73 (BB) Nilai	9.820.793.559
					Indeks Profesionalitas ASN		57,50 Nilai				64,10 Nilai	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75 Nilai				76 Nilai	
	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		15 dok	124.163.128			15 dok	125.680.000
			01	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	2 dok	55.466.864	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 dok	55.271.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	02	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.939.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dok	3.034.000
	03	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.465.300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dok	2.760.000
	04	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.710.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dok	5.642.000
	05	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.440.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 dok	2.685.000
	06	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	4 lap	8.849.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 lap	11.057.000
	07	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	5 lap	49.291.664	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 lap	45.231.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	8.525.381.576		12 bulan	8.693.410.559
		01	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Cimahi	40 orang	8.477.604.712	PAD, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	37 orang	8.647.150.559
		05	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Cimahi	1 lap	46.209.864	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 lap	44.657.000
		07	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kota Cimahi	1 lap	1.567.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 lap	1.603.000
2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		2 keg	67.238.300		2 keg	73.490.000
		10	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	70 orang	18.799.900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	70 orang	18.800.000
		11	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	8 orang	48.438.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10 orang	54.690.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	06	01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	348.401.028		12 bulan	347.991.000
			SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	1 paket	2.396.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 paket	2.396.000
			SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	1 paket	77.011.364	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 paket	77.596.000
			SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	7.869.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 paket	7.869.000
			SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	82.256.864	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 paket	81.263.000
			SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	61.831.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 paket	61.831.000
			SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kota Cimahi	5 lap	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5 lap	3.500.000
			SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Cimahi	100 lap	113.536.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	105 lap	113.536.000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan		12 bulan	114.688.000		12 bulan	177.675.000
2	07	06	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	4 unit	39.688.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	10 unit	100.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	1 unit	75.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 unit	77.675.000
	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	118.543.528		12 bulan	119.377.000
			01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Cimahi	4 lap	87.893.528	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4 lap	88.677.000
			02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Cimahi	12 lap	30.650.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 lap	30.700.000
	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara		12 bulan	282.832.064		12 bulan	283.170.000
			02	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Cimahi	10 kend	193.912.064	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 kend	193.940.000
			06	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Cimahi	30 unit	88.920.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	35 alat	89.230.000
JUMLAH								12.476.240.906			13.842.540.559

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan yang disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menjadi salah satu program prioritas RPD Kota Cimahi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, yang dijabarkan Bappenda Kota Cimahi kedalam rencana kegiatan berikut sub-sub kegiatannya untuk setiap program yang didasarkan dari penentuan strategi dan arah kebijakan Bappenda Kota Cimahi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program disertai indikator kinerja dan kebutuhan pendanaannya, yang diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan dari tujuan, sasaran dan program.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang sedang dihadapi, dan usulan program/ kegiatan dari masyarakat disinergikan dengan tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi, maka diperoleh Rencana Kerja dan Pendanaan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023, sebagaimana disajikan dalam tabel, berikut ini :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAH
TAHUN 2023

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan target pajak daerah	3%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	113.348 WP	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dok	59.999.814
	% Realisasi pajak daerah	100%				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	1 dok	158.000.000
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	7 lap	145.000.000
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit	430.994.778
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	2 lap	349.999.964
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 lap	51.999.964
						Penilaian Pajak Bumi dan	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang	145 objek	95.999.678

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)		disesuaikan NJOP nya	pajak	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	113.348 dok	829.999.250
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	117.241 dok	157.999.806
						Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.400 dok	130.000.000
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	419 dok	113.000.000
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dok	242.000.000
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12 dok	70.000.000
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 lap	60.000.000
Penunjang Urusan	Nilai SAKIP perangkat	71 (BB) Nilai	Perencanaan, Penganggaran	Jumlah dokumen	15 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 dok	55.466.864

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	daerah		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		Daerah		daerah		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	2.939.800
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.465.300
	Indeks profesionalitas ASN	57,50 Nilai				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	2.710.000
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.440.000
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 lap	8.849.500
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 lap	49.291.664
			Administrasi Keuangan	Jumlah bulan fasilitasi	12 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang	8.477.604.712

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			Perangkat Daerah	administrasi keuangan perangkat daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	46.209.864
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 lap	1.567.000
			Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 Kegiatan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang	18.799.900
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	48.438.400
			Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.396.000
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	77.011.364
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	7.869.000
						Penyediaan Bahan Logistik	Kota Cimahi	Jumlah paket bahan logistik	2 paket	82.256.864

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Kantor		kantor yang disediakan		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	61.831.800
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 lap	3.500.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 lap	113.536.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	39.688.000
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	75.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	4 lap	87.893.528
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	30.650.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 kend	193.912.064

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
			Daerah			SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	88.920.000
JUMLAH										12.476.240.906

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Transfer. Rencana target pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2023, sebagai berikut :

TABEL 4.2
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2023

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 360.076.085.158
Pajak Daerah	Rp. 163.651.551.265
Retribusi Daerah	Rp. 12.611.650.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 9.391.200.000
Lain – lain PAD yang Sah	Rp. 174.421.683.893
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 739.424.201.442
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	Rp. 605.425.978.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 133.998.223.442
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.099.500.286.600

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Per Tanggal 15 Juli 2022

BAB V

PENUTUP

Renja PD tersebut sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, selain itu dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Rancangan renja PD Tahun 2023, ini nantinya akan menjadi tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Bappenda Kota Cimahi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana kerja PD Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Renja PD Tahun 2023 memuat 1 (satu) unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan keuangan, terdiri dari 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan program pengelolaan pendapatan daerah yang mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.476.240.906,- (*dua belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam rupiah*), terdiri dari :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.894.993.282,- (*dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*), sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 9.581.247.624,- (*Sembilan milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*), adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi

perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan penting menjadi perhatian utama Bappenda Kota Cimahi dan merupakan rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya, yaitu melaksanakan penyusunan perda/ perwal tentang pajak daerah, sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebabkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga perda dan perwal yang menjadi turunannya pada Tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi, pelaksanaan TP2DD, yang menjadi amanat dari Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, serta peningkatan kompetensi pegawai Bappenda, yang belum seluruhnya memiliki kompetensi keahlian terkait pajak khususnya pajak daerah.

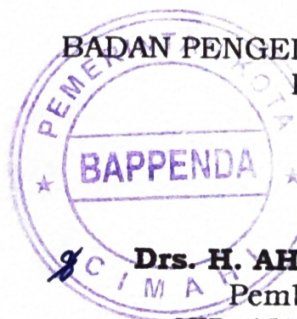
Dengan tersusunnya rencana kerja PD ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional atau prioritas daerah.

Demikian rencana kerja PD ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancangan akan dilaksanakan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja PD ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Cimahi, Juli 2022

KEPALA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon : (022) 6652559 Fax : (022) 6652559 Website : cimahikota.go.id
E-mail : bappenda@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAH I
NOMOR : 800/76/Bappenda

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH I
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH I,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kota Cimahi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antar instansi perangkat daerah di Kota Cimahi;
- b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun tingkat Kota terkait dengan Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
2. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;
3. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

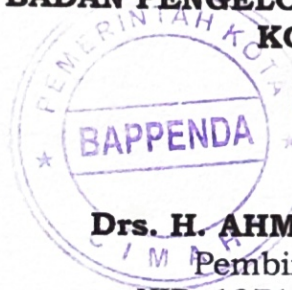
Adapun uraian tugas masing-masing anggota Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 februari 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800/76/Bappenda

TANGGAL : 21 februari 2022

TENTANG : **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PADA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023.**

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Badan
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Badan
- III. Ketua : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan.
- V. Anggota :
1. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Subbid Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan
 3. Kepala Subbid Pengawasan, Pengendalian, dan Pengawasan Pajak Daerah
 4. Kepala Subbid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
 5. Kepala Subbid Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
 6. Analis Rencana Program dan Kegiatan
 7. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 8. Analis Perencanaan
 9. Analis Pemeriksaan Pajak

**KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800/76/Bappenda

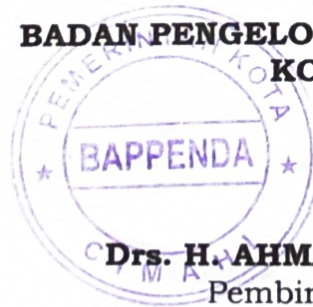
TANGGAL : 21 Februari 2022

TENTANG : **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PADA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023**

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : 1. Memberikan pengarahan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
2. Memberikan masukan dan memantau secara langsung Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
- II. Penanggung jawab : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
- III. Ketua : 1. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- IV. Sekretaris : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
- V. Anggota : 1. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
2. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);

**KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



Drs. H. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002